



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

SUMSEL SEJAHTERA, MAJU DAN TERDEPAN

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Permenpan nomor 53 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah setingkat eselon II keatas untuk menyusun Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mewujudkan Visi dan Misi, tujuan organisasi serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis instansi tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang Perindustrian melalui pelaksanaan kegiatan dengan berdasarkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2024 - 2026 dan RPD Provinsi Sumsel 2024-2026 yang telah ditetapkan. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dan evaluasi dari pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2024 sebagai laporan evaluasi kinerja OPD kepada pihak yang berkepentingan melaksanakan evaluasi dalam pencapaian pelaksanaan program / kegiatannya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini, dan berharap dapat menjadi bahan evaluasi bagi OPD dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatnya Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan lebih baik lagi di masa mendatang.

Palembang, 21 Maret 2025

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Dinas Perindustrian
Dra. Hj. NENG MUHAIBA, M.M
Pembina Utama Madya (IV,d)
NIP. 196511121995122001

RINGKASAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja OPD atas upaya pencapaian Visi Misi Dinas maupun dukungan terhadap Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan seperti tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024 – 2026, melalui pencapaian tujuan, sasaran dan beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2024 ini telah dilaksanakan beberapa program/kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Dan pada LKjIP ini kami pun berusaha untuk menjelaskan pencapaian kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan program-program kegiatan tersebut dalam bentuk realisasi fisik, keuangan dan narasi kinerja dengan keterangan pencapaian indikator keluaran/output dan hasil/outcome beserta dengan target pencapaian yang telah ditetapkan. Selain itu dalam upaya pencapaian sasaran kinerja, beberapa permasalahan yang dihadapi diupayakan untuk diungkapkan agar dapat ditemukan solusi penyelesaiannya.

Pencapaian Sasaran Kinerja

Didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan Satu (1) Visi, dua (2) Misi, tiga (3) Tujuan. Dalam tahun 2024 ini Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang ada dengan pencapaian target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa indikator kinerja dimaksud dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dalam hal pelaksanaan program-program tersebut melalui kegiatan maka harus didukung dengan data/informasi yang akurat di sektor industri maupun data pendukung lainnya sebagai dasar dari perencanaan sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain daripada itu bahwa pencapaian sasaran kinerja tersebut merupakan juga pencapaian sektor-sektor lain yang saling terkoordinasi dan bersinergi satu sama lain.

Kebijakan Pencapaian Sasaran

Untuk keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan industri yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan industri pengolahan kapasitas teknologi industri dan kualitas sumberdaya manusia.

Palembang, 21 Maret 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Kinerja	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tata Kerja	1
1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan utama	5
1.4. Landasan Hukum	7
1.5. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024	10
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran	8
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	9
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2024	10
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja	16
Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	17
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	18
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	19
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	20
Tabel 3.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	22
Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran ...	25
Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permenpan ini memberikan petunjuk teknis kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP bagi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan.

Sistem ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dapat di penuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang telah dilaksanakan.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) 2024 tersebut dibandingkan dengan Target dan Realisasi Kinerja 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

1.2 Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan terbentuklah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Dan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan bahwa tugas Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan adalah ***melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian***. Sedangkan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana dan Program pengembangan industri atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian Perindustrian.
- Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri.
- Pelaksanaan program kegiatan sektor industri di bidang industri agro, kimia, logam mesin, alat angkut dan industri kecil menengah.
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah Provinsi.
- Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan hukum.
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Industri Agro yang membawahi :
 1. Seksi Industri Hasil Kehutanan dan Perkebunan
 2. Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan
 3. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Holtikultura
- d. Bidang Industri Kecil dan Menengah yang membawahi :
 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah Makanan dan Minuman
 2. Seksi Industri Kecil dan Menengah Barang dari Kayu, Furniture dan alat angkut.
 3. Seksi Industri Kecil dan Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum
- e. Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin Alat transportasi Elektronika dan Telematika yang membawahi :
 1. Seksi Industri Kimia dan Logam
 2. Seksi Industri Mesin dan alat transportasi
 3. Seksi Industri Elektronika dan Telematika
- f. Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri yang membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan Sentra Industri
 2. Seksi Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri
 3. Seksi Pengembangan Kawasan Industri
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) UPTD, yaitu UPTD Industri Pangan dan Tekstil
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Uraian tugas dan fungsi dari penyusunan struktur organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 6 pejabat eselon III dan 18 orang pejabat eselon IV sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, sedangkan fungsinya adalah :

- a. Penetapan, pelaksanaan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- b. Penetapan Rencana Strategis dan pelaksanaan program kerja sektor industri sesuai dengan visi misi dinas;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan Peningkatan industri melalui program kerja di bidang Industri Agro, bidang Industri Kecil dan Menengah, bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, bidang Pengembangan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri serta Unit Pelayanan Teknis, atas dasar sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengembangan sektor industri dan peningkatan daya saing industri;
- e. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama sektor industri dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait yang berada di provinsi maupun pusat ataupun lembaga, organisasi/asosiasi dan dunia usaha serta lainnya;

- f. Pelaksanaan program dan kebijakan pengembangan perwilayahan industri, sumber daya industri dan peningkatan daya saing industri melalui pembinaan sentra – sentra IKM;
- g. Penetapan kebijakan teknis dan program kerja dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- h. Pengawasan dan Pengendalian mutu serta pemantauan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- i. Pemberian masukan/saran dan pendapat kepada gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perindustrian sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah provinsi;
- j. Bertindak sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang satuan kerja perangkat daerah;
- k. Pengelolaan urusan perindustrian melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang sekretariat, bidang teknis dan unit pelayanan teknis ;
- l. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bidang/UPTD teknis dan kinerja Dinas secara keseluruhan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan sekretariat yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan administrasi ketatausahaan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Industri Agro

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang industri agro. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang industri agro baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri agro;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang industri agro;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang industri agro, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di industri agro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri agro;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang industri agro;
- h. pelaksanaan tugas lain di Bidang Industri Agro yang ditugaskan oleh pimpinan;

4. Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin Alat transportasi Elektronika dan Telematika

Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika yang ditugaskan oleh pimpinan.

5. Bidang Industri Kecil dan Menengah

Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang IKM, sedangkan fungsinya adalah :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/ program kerja di bidang Industri Kecil dan Menengah baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Industri Kecil dan Menengah, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Kecil dan Menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Industri Kecil dan Menengah yang ditugaskan oleh pimpinan.

6. Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri

Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja

di Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/ program kerja di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri yang ditugaskan oleh pimpinan.

7. UPTD Industri Pangan & Tekstil

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, serta dalam rangka pembangunan industri yang maju melalui penguatan struktur industri yang mandiri dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Industri Pangan dan Tekstil sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018.

UPTD Industri Pangan dan Tekstil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian yang bersifat teknis operasional dan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang industri pangan dan tekstil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Industri Pangan dan Tekstil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil;
- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Industri pada Dinas Perindustrian yaitu :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi;
- d. Seksi Pengembangan Usaha;
- e. Sub Unit;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan utama

Aspek Strategis yang dimiliki Dinas Perindustrian Prov. Sumsel adalah Pengembangan industri berbasis kompetensi inti/unggulan daerah.

- Pengembangan industri pengolahan hilir terutama produk komoditi unggulan Sumsel sesuai RPIP Sumsel.
- Pembinaan dan pengembangan IKM yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan OVOP.
- Mendorong pembangunan sarana dan prasarana industri seperti pelabuhan samudra, kawasan industri serta mendorong pertumbuhan sentra sentra industri di Sumsel.
- Mendorong peningkatan kontribusi PDRB Industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumsel.

Dalam mencapai tujuan pembangunan industri yang tertuang dalam RPIP beberapa permasalahan internal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- Terbatasnya sarana dan prasarana kerja sehingga berdampak belum optimalnya pelayanan publik dan pembinaan kepada IKM;
- Kemajuan teknologi aplikasi pada bidang perencanaan, keuangan dan penyediaan data/informasi maupun teknologi peralatan teknis untuk IKM belum didukung oleh SDM aparatur yang trampil dan profesional di bidang keilmuannya;
- Lambatnya penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan WPPI, KPI maupun kawasan industri Sumsel.
- Belum optimalnya koordinasi dan sinergisitas program pengembangan sektor Industri antar OPD/Badan ataupun lembaga;
- Penyiapan/dukungan data-data industri yang belum tersedia dan tersaji dengan baik;
- Lambatnya kabupaten/kota dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri daerahnya dapat menghambat pengembangan sektor Industri daerahnya serta menyulitkan implementasi RPIP Sumsel yang telah ada.

Pemetaan permasalahan eksternal dalam pembangunan sektor industri di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Industri Sumatera Selatan

No	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi produk industri berbasis potensi daerah	* Proses Hilirisasi Industri Komoditi Agro mengalami perlambatan dikarenakan sulitnya mendapatkan jaminan pasokan bahan baku Industri;
		* Terbatasnya jumlah SDM Industri yang memiliki kompetensi dibidangnya;
		* Inovasi Teknologi dan Perbaikan Tata Cara Kerja yang lebih baik cukup mengalami hambatan dikarenakan sulitnya merubah kebiasaan pengrajin IKM.
		* Karakteristik Pengrajin IKM yang kurang dapat disatukan menyebabkan rendahnya <i>bargaining position</i> Pengrajin IKM terhadap Konsumen, Pesaing dan Pemasok Bahan Baku;
		* Penyediaan skema permodalan (KUR, CSR, produk perbankan) belum termamfaatkan secara optimal oleh pelaku industri untuk meningkatkan skala usahanya;
		* Kurangnya koordinasi dan sistematika pembinaan antar <i>Stakeholder</i> (BUMN, Dinas, Kementrian dan Lembaga) mengakibatkan Fokus dan Arah pembinaan Industri menjadi tidak efektif dan efesien

No	Masalah	Akar Masalah
		* Kuantitas dan kualitas bahan baku maupun produk industri masih rendah, belum konsisten dan belum terstandarisasi
		* Terbatas pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha Industri
		* Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan Industri serta skala usaha industri masih perlu ditingkatkan agar lebih ekonomis
		* Masih terbatasnya akses pemasaran produk industri (menengah dan kecil) ke pasar nasional, regional dan global baik secara langsung maupun secara online
		* Industri pengolahan masih terbatas pada industri pengolahan yang menghasilkan komoditas primer dan belum tersedianya zona-zona industri sesuai peruntukan
		* Belum optimalnya dukungan terhadap investor fasilitasi pembiayaan

1.4 Landasan Hukum

1. Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi.
2. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tata Kerja
- 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 memiliki tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan landasan maupun pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak 2024-2026.

Dalam memenuhi tujuan tersebut, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mendasarkan pada visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang disusun pada saat pelaksanaan periode akhir dimana untuk mencapai target RPJPD diakhir periode. Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 - 2025 dinyatakan dengan visi yang ingin dicapai, yaitu “Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi, yaitu (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber daya energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, (4) dan meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam misi tersebut terkait dengan misi pertama yaitu menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional. Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan yaitu meningkatnya daya saing industri prioritas daerah, dengan sasaran sebagai berikut: meningkatnya pertumbuhan unit usaha produk IKM unggulan daerah berbasis sumber daya lokal, meningkatnya investasi industri menengah besar dalam perwilayahan industri, meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM industri daerah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Unit Usaha Produk IKM Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,10	5,15	5,20
			Jumlah Industri Kecil Menengah	15.170	16.013	16.334
		Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri.	Industri Menengah Besar	560	576	593
			Jumlah Sentra Industri Kreatif	42	43	44

		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	Jumlah Industri Kreatif	7.115	7.328	7.548
--	--	--	-------------------------	-------	-------	-------

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Tujuan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan adalah Meningkatkan Daya Saing Industri Prioritas Daerah dengan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut: 1) meningkatnya pertumbuhan unit usaha produk IKM unggulan daerah berbasis sumber daya lokal yang ditandai dengan indikator kinerja diantaranya (1) Pertumbuhan Kinerja PDRB sektor industri pengolahan tahun 2024 sebesar 5,10% tahun 2025 sebesar 5,15% dan tahun 2026 sebesar 5,20%. (2) Jumlah Industri Kecil Menengah tahun 2024 sebanyak 15.170 tahun 2025 sebanyak 16.013 dan tahun 2026 sebanyak 16.334; 2) meningkatnya investasi industri menengah besar dalam perwilayahan industri, dengan indikator kinerja yaitu (1) Jumlah Industri Menengah Besar tahun 2024 sebanyak 560 tahun 2025 sebanyak 576 dan tahun 2026 sebanyak 593; (2) Jumlah Sentra Industri Kreatif tahun 2024 sebanyak 42 tahun 2025 sebanyak 43 dan tahun 2026 sebanyak 44; (3) meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM industri daerah yang ditandai dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Industri Kreatif tahun 2024 sebanyak 7.115 tahun 2025 sebanyak 7.328 dan tahun 2026 sebanyak 7.548.

1.1.Rencana Kinerja Tahun 2024

Berikut merupakan Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.2.1 Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Unit Usaha Produk IKM Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	5,10
			Jumlah Industri Kecil Menengah	IKM	15.170
		Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri.	Industri Menengah Besar	IMB	560
			Jumlah Sentra Industri Kreatif	SIK	42
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	Jumlah Industri Kreatif	IK	7.115

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Rencana Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mempunyai tujuan meningkatnya daya saing industri prioritas daerah, dengan 3 sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Unit Usaha Produk IKM Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.
- 2) Meningkatkan Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri
- 3) Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah

Indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan sebesar 5,10%
- 2) Jumlah Industri Kecil Menengah sebanyak 15.170 IKM
- 3) Industri Menengah Besar sebanyak 560 IMB
- 4) Jumlah Sentra Industri Kreatif sebanyak 42 SIK
- 5) Jumlah Industri Kreatif sebanyak 7.115 IK

1.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustri Provinsi Sumatera Selatan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah			
	Meningkatnya Pertumbuhan Unit Usaha Produk IKM Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	5,10
		Jumlah Industri Kecil Menengah	IKM	15.170
	Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri.	Industri Menengah Besar	IMB	560
		Jumlah Sentra Industri Kreatif	SIK	42
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	Jumlah Industri Kreatif	IK	7.115

Adapun program/kegiatan/subkegiatan dalam mencapai target kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 pada tabel berikut.

Tabel 2.4.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	10.815.033.455
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	105.000.000
1)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	50.000.000
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	55.000.000
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100%	7.120.666.826
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang	6.887.666.826

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		208.000.000
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan baik	100%	70.000.000
6)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	50.000.000
7)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	20.000.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah dengan baik	100%	1.265.211.695
8)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 laporan	15.000.000
9)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	579.891.695
10)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 laporan	75.320.000
11)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 laporan	50.000.000
12)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000
13)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	505.000.000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%	1.686.665.845
14)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000
15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	767.492.845
16)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	914.173.000
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%	567.489.089
17)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	400.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	88.500.000
19)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi.	1 Unit	53.989.089
20)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000
II.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan baik	100%	1.204.000.000
7.	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	Persentase terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100%	1.204.000.000
21)	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	50.000.000
22)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	50.000.000
23)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	444.000.000
24)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	400.000.000
25)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	150.000.000
26)	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	110.000.000
III.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase terlaksananya program pengendalian izin usah industri	100%	200.000.000
8.	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	<i>Persentase terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	100%	200.000.000
27)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang	1 dokumen	100.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.		
28)	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	100.000.000
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	terlaksananya Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1 dokumen	175.000.000
9.	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	<i>Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1 dokumen	175.000.000
29)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	100.000.000
30)	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	75.000.000
	Jumlah : 30 Kegiatan			12.394.033.455

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Yang mana akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk Outcome. Yang selanjutnya dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3. 1 Pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja

Kategori	Skala Nilai
Sangat Baik	$\geq 91 \%$
Baik	$\geq 76 - 90,99 \%$
Cukup	$\geq 66 - 75,99 \%$
Kurang	$\geq 51 - 65,99 \%$
Sangat Kurang	$\leq 50,99 \%$

Pada Tahun 2024 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah						
	Meningkatnya Pertumbuhan Unit Usaha Produk IKM Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,10	4,39	86,08	Baik	BPS
		Jumlah Industri Kecil Menengah	15.170	19.540	128,81	Sangat baik	Dinas perindustrian
	Meningkatnya Investasi	Industri Menengah Besar	560	566	101,07	Sangat baik	Dinas perindustrian

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri.	Jumlah Sentra Industri Kreatif	42	42	100	Sangat baik	Dinas perindustrian
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	Jumlah Industri Kreatif	7.115	11.538	162,16	Sangat baik	Dinas perindustrian

Berdasarkan tabel diatas, secara umum presentase tingkat capaian tujuan dan sasaran tahun anggaran 2024, masuk dalam kriteria “sangat baik”. Seluruh tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan memenuhi target kinerja.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja utama dari tujuan meningkatnya daya saing industri prioritas daerah, pada sasaran meningkatnya nilai tambah program IKM unggulan daerah berbasis sumber daya lokal dengan indikator kinerja:

- 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan realisasinya sebesar 4,39% dari target 5,10% dengan capaian sebesar 86,08% termasuk kategori baik, data bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik).
- 2) Jumlah Industri Kecil Menengah realisasinya sebanyak 19.540 IKM dengan capaian sebesar 128,81% dari target yang ditetapkan sebesar 15.170 IKM termasuk kategori sangat baik sumber data dari Dinas Perindustrian Prov. Sumsel Tahun 2024.

Untuk sasaran Mengembangkan Industri Prioritas Sumsel dalam Perwilayahan Industri dengan indikator kinerja :

- 1) Industri Menengah Besar realisasinya sebanyak 566 IMB dengan capaian sebesar 101,07 % dari target yang ditetapkan sebanyak 560 IMB termasuk kategori sangat baik sumber data dari Dinas Perindustrian Prov. Sumsel Tahun 2024.
- 2) Jumlah Sentra Industri Kreatif realisasinya sebanyak 42 SIK dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 42 SIK termasuk kategori baik sumber data dari Dinas Perindustrian Prov. Sumsel Tahun 2024.

Pada Sasaran Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Industri Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Industri Kreatif realisasinya sebesar 11.538 Industri Kreatif dengan capaian sebesar 162,16 % dari target yang ditetapkan sebesar 7.115 Industri Kreatif termasuk kategori sangat baik sumber data dari Dinas Perindustrian Prov. Sumsel Tahun 2024.

3.2.Perbandingan Capaian Kinerja

Tabel 3.2.1
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah											
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Unit Usaha Produk IKM Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.	1.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,72	4,39	76,75	5,83	3,69	63,29	5,10	4,39	86,08
		1.2	Jumlah Industri Kecil Menengah	14.440	16.440	113,85	14.873	17.914	120,45	15.170	19.540	128,81
2.	Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri	2.1	Industri Menengah Besar	534	613	114,79	544	613	112,68	560	566	101,07
		2.2	Jumlah Sentra Industri Kreatif	40	40	100,00	41	180	439,02	42	42	100
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	3.1	Jumlah Industri Kreatif	6.801	9.192	135,16	6.908	5.317	76,97	7.115	11.538	162,16

3.3.Perbandingan Capaian Kinerja

Capaian 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tersaji pada Tabel Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 berikut.

Tabel 3.2.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah				
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Unit Usaha Produk IKM Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,10	4,39	86,08
		Jumlah Industri Kecil Menengah	15.170	19.540	128,81
2.	Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri.	Industri Menengah Besar	560	566	101,07
		Jumlah Sentra Industri Kreatif	42	42	100
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	Jumlah Industri Kreatif	7.115	11.538	162,16

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 tersebut diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian masuk dalam kategori “Sangat Baik”.

Untuk kemajuan capaian sasaran strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.1 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah Meningkatnya Pertumbuhan Unit Usaha Produk IKM Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,39	5,10	86,08
		Jumlah Industri Kecil Menengah	19.540	15.170	128,81
2.	Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri	Industri Menengah Besar	566	560	101,07
		Jumlah Sentra Industri Kreatif	42	42	100
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	Jumlah Industri Kreatif	11.538	7.115	162,16

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan capaiannya ditahun 2023 sebesar 63,29% sedangkan target akhir 2023 yang ditetapkan sebesar 5,83% maka tingkat kemajuannya yang diperoleh sebesar 1.085,59%. Indikator kinerja jumlah industri kecil menengah capaiannya di Tahun 2023 sebesar 120,45% sedangkan target akhir 2023 yang ditetapkan sebesar 14.873 IKM maka tingkat kemajuannya yang diperoleh adalah sebesar 0,81%. Indikator kinerja jumlah industri menengah besar capaiannya di Tahun 2023 sebesar 112,68% sedangkan target akhir 2023 Industri Menengah Besar yang ditetapkan sebesar 544 maka tingkat kemajuannya yang diperoleh adalah sebesar 20,71%. Indikator kinerja jumlah sentra industri kreatif capaiannya di Tahun 2023 sebesar 439,02% sedangkan target akhir 2023 Sentra Industri Kecil yang ditetapkan sebesar 41 maka tingkat kemajuannya yang diperoleh adalah sebesar 1.070,78%. Indikator kinerja jumlah industri kreatif capaiannya di Tahun 2023 sebesar 79,97% dari target akhir 2023 industri kreatif yang ditetapkan sebesar 6.908 maka tingkat kemajuannya yang diperoleh adalah sebesar 1,11%

Untuk melihat indikator kinerja yang jika diperbandingkan capaian dengan standar nasional seperti ditabel dibawah ini.

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah				
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Unit Usaha Produk IKM Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,39		
		Jumlah Industri Kecil Menengah	19.540	0	
2.	Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri	Industri Menengah Besar	566	0	
		Jumlah Sentra Industri Kreatif	42	0	
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	Jumlah Industri Kreatif	11.538	0	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan realisasinya pada tahun 2024 adalah sebesar 4,39% sedangkan standar nasionalnya sebesar 8,5% sehingga capaiannya sebesar 43,41%. Indikator kinerja Industri Kecil Menengah realisasinya sebesar 17.914 IKM, indikator kinerja Industri Menengah Besar realisasinya sebesar 613 IMB, indikator kinerja Sentra Industri Kreatif realisasinya sebesar 180 Sentra Industri Kreatif, indikator kinerja Industri Kreatif sebesar 5.317 industri kreatif. Sedangkan standar nasionalnya untuk indikator tersebut di atas tidak ada

Pada tabel 3.5 tersaji tingkat capaian indikator sasaran di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang dianalisa menjadi sebuah keberhasilan / kegagalan serta solusi yang dilakukan.

Tabel 3.5. Analisis keberhasilan, kegagalan, dan solusi yang dilakukan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah						
1.	Meningkatnya nilai tambah program IKM unggulan daerah berbasis sumber daya lokal	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,10	4,39	86,08	terlaksana dengan baik	Untuk lebih ditingkatkan dalam proses penyerapan anggaran
		Jumlah Industri Kecil Menengah	15.170	19.540	128,81	terlaksana dengan baik	Untuk lebih ditingkatkan dalam proses penyerapan anggaran
2.	Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri	Industri Menengah Besar	560	566	101,07	terlaksana dengan baik	Untuk lebih ditingkatkan dalam proses penyerapan anggaran
		Jumlah Sentra Industri Kreatif	42	42	100	terlaksana dengan baik	Untuk lebih ditingkatkan dalam proses penyerapan anggaran
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	Jumlah Industri Kreatif	7.115	11.538	162,16	terlaksana dengan baik	Untuk lebih ditingkatkan dalam proses penyerapan anggaran

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan capaian yang diperoleh dari indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Jumlah Industri Kecil Menengah, Industri Menengah Besar, Jumlah Sentra Industri Kreatif, dan Jumlah Industri Kreatif dapat terlaksana dengan baik dan solusinya untuk lebih ditingkatkan lagi dalam proses penyerapan anggaran.

Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang					
1.	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah	1.1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		86,08	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	terlaksananya Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	97,84	Menunjang					
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)				tersedianya kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	97,84	Menunjang						
	Meningkatnya nilai tambah program IKM unggulan daerah berbasis sumber daya lokal				1.2. Jumlah Industri Kecil Menengah	128,81	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	86,65	Menunjang			
					Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	terlaksananya penyusunan penerapan, dan evaluasirencana pembangunan industri provinsi	86,65	Menunjang					
	2.	Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar	2.1.	Industri Menengah Besar	101,07	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	96,09	Menunjang				

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	dalam Perwilayahan industri				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	96,09	Menunjang
		2.2.	Jumlah Sentra Industri Kreatif	100	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	86,65	Menunjang
					Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	terlaksananya penyusunan penerapan, dan evaluasirencana pembangunan industri provinsi	86,65	Menunjang
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	3.1.	Jumlah Industri Kreatif	162,16	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	86,65	Menunjang
					Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	terlaksananya penyusunan penerapan, dan evaluasirencana pembangunan industri provinsi	86,65	Menunjang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa program, kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan menunjang tercapainya indikator kinerja yang sudah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran tersebut juga tercapai.

Tabel 3.7. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.815.033.455	Rp9.756.233.322	90,21
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	105.000.000	Rp101.217.273	96,40
1)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	47.096.225	94,19
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	54.121.048	98,40
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	7.120.666.826	Rp6.535.111.416	91,78
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.887.666.826	6.340.333.416	92,05
4)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	208.000.000	180.690.000	86,87
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	14.088.000	56,35
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	70.000.000	Rp54.592.970	77,99
6)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	39.665.248	79,33
7)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	14.927.722	74,64
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.265.211.695	Rp1.254.134.972	99,12
8)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.934.000	99,56
9)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	579.891.695	578.061.903	99,68
10)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.320.000	75.310.200	99,99
11)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	47.987.500	95,98
12)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	100,00
13)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.000.000	497.841.369	98,58
5.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.686.665.845	Rp1.355.414.539	80,36
14)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00
15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	767.492.845	558.793.539	72,81
16)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	914.173.000	791.621.000	86,59
6.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	567.489.089	Rp455.762.152	80,31
17)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000	312.697.063	78,17
18)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.500.000	64.076.000	72,40

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.989.089	53.989.089	100,00
20)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100,00
II.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.204.000.000	Rp1.043.226.030	86,65
7.	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	1.204.000.000	Rp1.043.226.030	86,65
21)	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	50.000.000	47.123.040	94,25
22)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50.000.000	46.207.570	92,42
23)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	444.000.000	406.438.965	91,54
24)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	400.000.000	324.552.299	81,14
25)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	150.000.000	133.367.170	88,91
26)	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	110.000.000	85.536.986	77,76
III.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	200.000.000	Rp192.178.640	96,09
8.	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	200.000.000	Rp192.178.640	96,09
27)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	100.000.000	94.614.050	94,61
28)	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	100.000.000	97.564.590	97,56
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	175.000.000	Rp171.219.084	97,84
9.	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	175.000.000	Rp171.219.084	97,84
29)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100.000.000	96.219.104	96,22

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30)	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	75.000.000	74.999.980	100,00
	Jumlah : 30 Kegiatan	12.394.033.455	Rp11.162.857.076	90,07

Tabel 3.8. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah								
	Meningkatnya nilai tambah program IKM unggulan daerah berbasis sumber daya lokal	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,10	86,08	4,39	175.000.000	171.219.084	97,84	tinggi
		Jumlah Industri Kecil Menengah	15.170	128,806	19.540	1.204.000.000	1.043.226.030	86,65	tinggi
	Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri	Industri Menengah Besar	560	101,07	566	200.000.000	192.178.640	96,09	tinggi
		Jumlah Sentra Industri Kreatif	42	100	42	1.204.000.000	1.043.226.030	86,65	tinggi
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	Jumlah Industri Kreatif	7.115	162,16	11.538	1.204.000.000	1.043.226.030	86,65	tinggi

Tabel 3.9. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	100%	10.815.033.455	Rp9.756.233.322	90,21	tinggi
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%	105.000.000	Rp101.217.273	96,40	tinggi
1)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	50.000.000	47.096.225	94,19	tinggi
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100%	55.000.000	54.121.048	98,40	tinggi
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%	7.120.666.826	Rp6.535.111.416	91,78	tinggi
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	37 orang	100%	6.887.666.826	6.340.333.416	92,05	tinggi
4)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	7 orang	100%	208.000.000	180.690.000	86,87	Sedang
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	25.000.000	14.088.000	56,35	Rendah
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%	70.000.000	Rp54.592.970	77,99	Sedang
6)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	50.000.000	39.665.248	79,33	Sedang
7)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	20.000.000	14.927.722	74,64	Sedang
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%	1.265.211.695	Rp1.254.134.972	99,12	tinggi
8)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 laporan	1 laporan	100%	15.000.000	14.934.000	99,56	tinggi

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
9)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	579.891.695	578.061.903	99,68	tinggi
10)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 laporan	1 laporan	100%	75.320.000	75.310.200	99,99	tinggi
11)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 laporan	1 laporan	100%	50.000.000	47.987.500	95,98	tinggi
12)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%	40.000.000	40.000.000	100,00	tinggi
13)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	505.000.000	497.841.369	98,58	tinggi
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.686.665.845	Rp1.355.414.539	80,36	Sedang
14)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%	5.000.000	5.000.000	100,00	tinggi
15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	100%	767.492.845	558.793.539	72,81	Sedang
16)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	100%	914.173.000	791.621.000	86,59	Sedang
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	567.489.089	Rp455.762.152	80,31	Sedang
17)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	9 unit	100%	400.000.000	312.697.063	78,17	Sedang
18)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	1 Paket	100%	88.500.000	64.076.000	72,40	Sedang
19)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	53.989.089	53.989.089	100,00	tinggi
20)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	25.000.000	25.000.000	100,00	tinggi

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
II.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100%	100%	100%	1.204.000.000	1.043.226.030	86,65	Sedang
7.	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	100%	100%	100%	1.204.000.000	1.043.226.030	86,65	Sedang
21)	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100%	50.000.000	47.123.040	94,25	tinggi
22)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	50.000.000	46.207.570	92,42	tinggi
23)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	444.000.000	406.438.965	91,54	tinggi
24)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	400.000.000	324.552.299	81,14	Sedang
25)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%	150.000.000	133.367.170	88,91	Sedang
26)	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	110.000.000	85.536.986	77,76	Sedang
III.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	100%	100%	100%	200.000.000	Rp192.178.640	96,09	tinggi
8.	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	100%	100%	100%	200.000.000	Rp192.178.640	96,09	tinggi
27)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100%	100.000.000	94.614.050	94,61	tinggi

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
28)	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegritas dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1 dokumen	1 dokumen	100%	100.000.000	97.564.590	97,56	tinggi
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1 dokumen	1 dokumen	100%	175.000.000	Rp171.219.084	97,84	tinggi
9.	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1 dokumen	1 dokumen	100%	175.000.000	Rp171.219.084	97,84	tinggi
29)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	1 dokumen	100%	100.000.000	96.219.104	96,22	tinggi
30)	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	1 dokumen	100%	75.000.000	74.999.980	100,00	tinggi
	Jumlah : 30 Kegiatan				12.394.033.455	Rp11.162.857.076	90,07	tinggi

BAB IV PENUTUP

IV. 1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD tahun 2024 berlangsung baik dengan realisasi keuangan mencapai 90,07% atau terealisasi Rp. 11.162.857.076,00 dari pagu Rp. 12.394.033.455,00 dan secara fisik mencapai 100%. Realisasi ini mengalami kenaikan 8,35% dari tahun 2023 yang mencapai 81,72% atau terealisasi Rp. 13.225.381.382,00 dari pagu Rp. 16.184.282.741,00 dan secara fisik mencapai 100%. Berbagai kendala yang dihadapi pada tahun 2024 yang lalu beberapa telah disikapi secara baik terutama pelaksanaan program/kegiatan yang diselesaikan secara tuntas.
2. Pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBN yang berasal dari Kementerian Perindustrian RI Direktorat Industri Kecil Menengah dan Aneka tahun 2024 pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri untuk Kegiatan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka melalui Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 2.136.259.000,- Realisasi Keuangan Triwulan IV Tahun 2024 adalah Rp. 1.979.199.000,- atau 92,65 % dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 157.060.000,- atau 7,35%. Angka ini lebih rendah 7,12% dari realisasi tahun 2023 sebesar 99,77% dengan pagu anggaran Rp. 2.280.000.000,00 yang terealisasi Rp. 2.274.693.400,00 atau 99,77% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 5.306.600,00 atau 0,23%. Namun secara umum bahwa pelaksanaan program kegiatan APBN tahun 2024 tidak terkendala hal-hal yang berarti, tetapi tetap harus ditingkat kinerjanya di tahun mendatang.
3. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melalui pencapaian beberapa indikator kinerja secara umum mencapai target yang telah ditetapkan.

IV.2. SARAN

1. Penanganan permasalahan yang ada di sektor Industri memerlukan perencanaan dan koordinasi yang baik, efektif dan realitis dengan didukung data yang akurat, serta komitmen dari pimpinan dan seluruh komponen yang ada didalam OPD.
2. Evaluasi terhadap struktur organisasi dan komposisi aparatur didalam struktur organisasi perlu dilakukan, mengingat bahwa penempatan aparatur yang tepat pada posisi-posisi yang tepat dan strategis sangat menentukan hasil pelaksanaan tupoksi aparatur di setiap Bidang/UPTD nya dalam pencapaian kinerja dan pelayanan OPD.
3. Perlunya RPIP Sumsel tahun 2017-2037 diintegrasikan ke dalam RPJMD Provinsi Sumsel dan Renstra OPD-OPD dalam rangka membangun sektor industri secara bersama-sama.

Akhirnya, semoga apa yang telah diuraikan dalam LKjIP tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja pencapaian Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan menjadi bahan evaluasi kinerja yang sangat penting untuk peningkatan kinerja di tahun 2025 mendatang.

Palembang, 21 Maret 2025



KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS
PERINDUSTRIAN

Dra. Hj. NENG MUHAIBA, M.M.
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196511121995122001

Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) terhadap LKJIP 2024 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status (Penyelesaian)	Keterangan
1	3	4	5	6	7
1.	Agar dapat mengupload atau mempublikasikan dokumen tepat waktu.	Dokumen sudah diupload sesuai tepat waktu.	PEP	sudah	https://drive.google.com/drive/folders/17UhTRHJOLYyDTdjjzDhxlKlp978aSS?usp=drive_link
2.	Melakukan penyempurnaan penjabaran keselarasan (cascade down) kinerja, mulai dari indikator kinerja di level eselon II, eselon III, eselon IV dan sampai ke perjanjian individu pegawai	Telah melakukan penjabaran kelarasan Cascade dari indikator kinerja eselon II, III, IV dan perjanjian individu pegawai.	PEP	sudah	https://drive.google.com/drive/folders/1LIMrcvnYOaaDnfbBVPpSn8bLor5bVroA?usp=drive_link
3.	Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Data kinerja sudah dikumpulkan melalui aplikasi MyASN	PEP	sudah	https://drive.google.com/file/d/1g69be-pcqF7g92-FJn_Y3tbqCKPyTQcg/view?usp=drive_link
4.	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala serta dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja dan pengambilan keputusan.	Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dari aplikasi MyASN	PEP	sudah	https://drive.google.com/file/d/1g69be-pcqF7g92-FJn_Y3tbqCKPyTQcg/view?usp=drive_link

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status (Penyelesaian)	Keterangan
1	3	4	5	6	7
5.	Menyusun rencana aksi kinerja (action plan) kinerja yang memuat target dan sasaran dan indikator kinerja, program dan kegiatan perangkat daerah.	Rencana aksi kinerja (action plan) sudah memuat target, sasaran, dan indikator kinerja, program dan kegiatan perangkat daerah.	PEP	sudah	Rencana Aksi 2024
6.	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap rencana aksi kinerja secara berjenjang dan berkala untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.	Memonitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala.	PEP	sudah	Monev Rencana Aksi 2024
7.	Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> bagi pegawai yang berkinerja baik dan <i>punishment</i> bagi pegawai yang berkinerja dibawah standar yang ditetapkan.	Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	PEP	sudah	https://drive.google.com/file/d/1q69be-pcqF7g92-FJn_Y3tbqCKPyTQcg/view?usp=drive_link

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status (Penyelesaian)	Keterangan
1	3	4	5	6	7
8.	Agar melakukan review laporan kinerja (LKjIP) tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi AKIP.	Mereview Laporan Kinerja (LKjIP) kepada Inspektorat	PEP	sudah	Giat melakukan review laporan kinerja